

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi dunia global yang penuh dengan persaingan, sebuah perusahaan dituntut untuk bertahan dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang selalu berkembang. Salah satu cara untuk bisa bertahan adalah bahwa perusahaan harus pandai dalam pengelolaan fungsi manajemen perusahaan. Diantaranya adalah pengelolaan fungsi manajemen keuangan karena pengelolaan keuangan berpengaruh dalam operasi dan pengembangan perusahaan. Perusahaan memerlukan dana untuk hal tersebut. Sementara itu sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari modal internal dan eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, penggunaan laba, dan cadangan-cadangan, sedangkan modal eksternal bersumber dari hutang atau penerbitan saham baru.

Perusahaan memerlukan dana yang besar untuk tumbuh dan berkembang ditengah persaingan yang ketat dan pesat. Pendanaan merupakan aspek terpenting dalam perusahaan karena perusahaan memerlukan dana untuk kelangsungan bisnisnya yang berkaitan dengan sumber dana dan penggunaan dana yang diperoleh. Pendanaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan seperti laba ditahan dan modal sendiri. Pendanaan eksternal adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (eksternal), seperti hutang

dan penerbitan saham. Apabila sumber pendanaan yang berasal dari internal perusahaan tidak mencukupi maka perusahaan akan mengambil alternatif pendanaan dari eksternal perusahaan yaitu hutang. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan, pendanaan eksternal berupa hutang lebih diminati oleh pemilik saham. Namun, sebagian manajer tidak menginginkan pendanaan eksternal karena hutang memiliki risiko yang tinggi bagi perusahaan. Oleh sebab itu kebijakan hutang sering digunakan dalam pengambilan keputusan pendanaan sebagai bentuk monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.

Perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan pendanaan secara tepat. Keputusan pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dalam melakukan pembiayaan melalui hutang [1].

Kebijakan hutang perusahaan yang merupakan hasil pembagian antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah total antara kewajiban jangka panjang dan modal sendiri. Penggunaan hutang dapat untuk mengurangi agency conflict dan asimetri informasi perusahaan mengeluarkan hutang. Hutang berarti memberikan signal kepada investor akan kemampuan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Kebijakan hutang perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage perusahaan. Leverage adalah rasio yang membandingkan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana yang berasal dari kreditur. Pada umumnya kreditur dan calon kreditur memerlukan informasi berapa dana pemilik sebagai dasar menentukan tingkat keamanan kredit. Untuk memenuhi kebutuhan

pendanaan, pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang karena dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang. Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini disebut sebagai keterbatasan rasional [2].

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya mulai dari proses produksi sampai dengan produk yang siap untuk dijual. Oleh karena adanya proses produksi tersebut tentunya perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan akan membutuhkan pinjaman yang lebih besar juga sehingga perusahaan lebih memikirkan mengenai kebijakan hutang yang digunakan.

Contoh kasus masalah finansial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu :

Tabel 1.1

Data Debt to Equity Ratio Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019

NO	Emiten	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Akasha Wira International Tbk	0.99	1.00	0.99	0.91	0.49
2	PT. Sepatu Bata Tbk	0.81	0.45	0.44	0.48	0.32
3	PT. Charoen Pokhpand Indonesia Tbk	0.97	0.71	0.56	0.46	0.39

4	PT. Delta Djakarta Tbk	0.18	0.17	0.19	1.10	0.02
5	PT. Indal Aluminium Industry Tbk	4.55	4.19	3.38	3.83	2.62
6	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	1.13	0.87	0.88	0.98	0.77
7	PT. Kalbe Farma Tbk	0.25	0.22	0.20	0.20	0.21
	Rata-rata	1.27	1.09	0.95	1.14	0.69

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan DER (Debt to Equity Ratio) yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. DER perusahaan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2015-2019, artinya adanya peningkatan dan penurunan penggunaan aktiva pada perusahaan manufaktur yang dibiayai oleh hutang. Dimana pada tahun 2015 beberapa perusahaan manufaktur memiliki rata-rata kebijakan hutang sebesar 1.27 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1.09, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0.95 kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.14 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 0.69.

Semakin rendah debt to equity ratio, maka semakin rendah hutang yang dimiliki oleh perusahaan begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai debt to equity ratio maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Artinya semakin besar kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain, dan ketika DER suatu perusahaan mengalami penurunan maka semakin rendah kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena kebijakan utang harus mempertimbangkan komposisi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, serta mengelola hutang secara lebih baik lagi.

Kebijakan hutang juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang menggambarkan tinggi rendahnya kegiatan operasional perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur modalnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial (managerial ownership) adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur dan komisaris.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan hutang oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi baik pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing. Kepemilikan institusional diperoleh dari laporan keuangan akhir periode yang telah diaudit. Kepemilikan institusional dan total saham yang beredar berada di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki empat kelebihan yaitu yang pertama mempunyai sumber daya yang lebih dalam mendapatkan informasi. Kedua, lebih profesional dalam menganalisis informasi.

Ketiga, mempunyai jaringan bisnis yang kuat. Terakhir, mempunyai dorongan yang kuat dalam memonitor kegiatan perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan modal oleh investor yang bukan berasal dari Indonesia atau asing. Dengan banyaknya kepemilikan asing dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena pihak asing memiliki sistem manajemen dan teknologi yang cukup baik dan bisa tersebar bersama dengan kegiatan penanaman modal asing yang memiliki pengaruh yang positif bagi perusahaan. Serta manajer akan lebih efisien dalam menentukan kebijakan perusahaan, salah satunya dalam menentukan kebijakan utang perusahaan.

Menurut [3] kebijakan hutang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh utang ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah yang akan disediakan peminjam (kreditur) kepada pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Menurut [4] ukuran perusahaan (firm size) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva / besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

Menurut [5] kepemilikan manajerial pihak manajerial dalam suatu perusahaan yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk di

dewan komisaris dan direksi perusahaan. Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usaha suatu perusahaan.

Menurut [6] kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.

Menurut [7] kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Menurut penelitian terdahulu [8] ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan ataupun nilai total aktiva dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh penting terhadap integrasi antar bagian dalam perusahaan, hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya pendukung yang lebih besar dibanding perusahaan yang lebih kecil.

Asumsi dalam pecking order theory, semakin besar perusahaan maka kecenderungan untuk berhutang juga akan semakin kecil, artinya perusahaan cenderung untuk menggunakan dana dari internal. Hal ini terjadi karena perusahaan besar mempunyai resiko bangkrut lebih besar oleh karena itu perusahaan besar lebih menyukai dana dari internal daripada harus berhutang.

Menurut penelitian terdahulu [9] Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial diasumsikan dapat mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul

dalam suatu perusahaan, semakin tinggi kepemilikan manajerial maka konflik antara pemegang saham dengan manajer akan berkurang. Ini disebabkan karena manajer sekaligus pemegang saham akan mengharapkan atau memiliki tujuan yang sama dengan pemegang saham.

Menurut penelitian terdahulu [10] kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Menurut penelitian terdahulu[11] Perusahaan berbasis asing biasanya dalam pengawasannya terhadap perusahaan lebih ketat karena pihak asing mengharapkan pengembalian yang besar pula terhadap perusahaan yang mereka miliki sahamnya. Pihak asing memiliki sistem manajemen dan teknologi yang cukup baik dan bisa tersebar bersama dengan kegiatan penanaman modal asing sehingga kepemilikan asing dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik salah satunya dalam menentukan pengambilan keputusan pendanaan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2015-2019.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya pendanaan eksternal karena hutang memiliki risiko yang tinggi bagi perusahaan.
2. Semakin besar tingkat hutang maka semakin besar risiko kegagalan perusahaan untuk membayar hutang dan risiko kebangkrutan.
3. Perbedaan pandangan antara manajemen dan pemegang saham dalam penggunaan struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan.
4. Pihak manajemen untuk mempertimbangkan komposisi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, serta mengelola hutang secara lebih baik lagi.
5. Perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan akan membutuhkan pinjaman yang lebih besar juga sehingga perusahaan lebih memikirkan mengenai kebijakan hutang yang digunakan.

6. Masih banyaknya hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang belum konsisten terlihat dari perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lainnya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada ukuran perusahaan (X1), kepemilikan manajerial (X2), kepemilikan institusional (X3), kepemilikan asing (X4) sebagai variabel independen, dan variabel dependen kebijakan hutang (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap kebijakan hutang serta menambah pengalaman peneliti .

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung kepemilikan manajemen supaya meningkatkan kualitas ukuran perusahaan dan menerapkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dalam mengelola kebijakan hutang perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi ketika melakukan penelitian lebih lanjut terutama penelitian yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan.